

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KUALITAS
APARATUR PEMERINTAH DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru)**

Oleh :

Winda Amelia

Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Azhari S

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru. Indonesia

Email : windaamelia@yahoo.com

*Effect of Area Financial Accounting System, Quality of Government officials
and Control Activities of Financial Accountability
(Study at Regional Organizations (OPD)'s City of Pekanbaru)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of area financial accounting system, quality of government officials and control activities of financial accountability. The population in this study are all Regional Organizations (OPD)'s City of Pekanbaru. Sample of regional organizations in this study as many as 30 Regional Organizations. While the data processed in this study as many as 90 of data where the data obtained from three employee of each of these Regional Organizations. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis were processed with SPSS Windows 19. The results show that area financial accounting system the $t (3.758) > t \text{ table } (1.987)$ and significant $(0.000) < (0.05)$, quality of government officials that $t \text{ arithmetic } (2.767) > t \text{ table } (1.987)$ and significant $(0.007) < (0.05)$, control activities $t (2.435) > t \text{ table } (1.987)$ and significant $(0.009) < (0.05)$. Area financial accounting system, quality of government officials and control activities affect financial accountability amounting to 62.9%. While 37.1% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: System, quality, activities and accountability.

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Perubahan pengelolaan keuangan daerah berupa adanya penggunaan akuntansi dalam

pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2008). Penggunaan akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang dapat diaudit (*auditable*) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan (Daeng M. Nazier, 2006).

Penyajian informasi yang transparansi nantinya akan mewujudkan akuntabilitas di suatu daerah tersebut.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai tiga komponen yaitu integritas keuangan (kejujuran dalam penyajian laporan keuangan berupa adanya hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya), pengungkapan (mengungkapkan semua hal yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang daerah) , dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan (laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan perturan yang berlaku) (Abdul Halim (2008:254)).

Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan daerah yang merupakan media pertanggungjawaban.

Fenomena yang terkait dengan akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari contoh kasus atas hasil pemeriksaan oleh BPK yang menyatakan bahwa LKPD Kota Pekanbaru meraih opini WDP secara berturut- turut pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan buruknya akuntabilitas keuangan Kota Pekanbaru. BPK menemukan banyaknya transaksi yang belum disajikan secara wajar dan tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan adanya ketidakpatuhan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan lainnya adalah kegiatan retribusi yang tidak sesuai ketentuan dan belum dipertanggungjawabkan, contoh : kegiatan parkir. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dalam pembentukan PAD yang berpotensi untuk dioptimalkan nilainya. Permasalahan yang berkaitan dengan retribusi parkir adalah manajemen parkir. Salah satu contohnya adalah juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir. (Sumber: bpk.go.id/hasilpemeriksaan/lkpdkotapekanbaruahun2014/02/07/2014)

Dari permasalahan akuntabilitas tersebut, saya menyimpulkan adanya tiga komponen yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya akuntabilitas suatu daerah yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Aparatur Pemerintah dan Aktivitas Pengendalian.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan suatu skema yang menyeluruh dan ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurnia (2013) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah, semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Menurut Boedi Prihandono (2009:12), selain sistem akuntansi keuangan daerah, keberadaan sumber daya manusia/SDM juga mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah. Pengertian sumber daya manusia secara umum adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lainnya.

Dalam penelitian ini sumber daya manusia yang akan diteliti adalah aparatur pemerintah daerah, yang diduga dapat mempengaruhi baik atau buruknya akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Jika dilihat dari fenomena yang dijelaskan diatas, permasalahan juga ditimbulkan akibat ketidakpatuhan pemerintah kota Pekanbaru terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal ini jelas membuktikan bahwa kualitas aparatur pemerintah sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

Hal diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2013) yang menemukan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah, ini ditunjukkan dengan semakin baik kualitas aparatur

keuangan daerah maka semakin terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah.

Komponen terakhir yang dibahas dalam penelitian ini adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan tahapan-tahapan sebagai bentuk pengendalian sebagai fungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Penelitian yang mendukung aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dilakukan oleh Nurhayati Soleha (2014), menemukan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah, artinya dengan aktivitas pengendalian yang baik akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan gabungan antara Nurhayati Soleha (2014) dan Indra Kurnia (2013). Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ulang dikarenakan beberapa hal. Pertama karena berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, alasan kedua, penelitian dirasa penting karena banyaknya masalah yang ditemukan oleh BPK yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang akhirnya menyebabkan dikeluarkannya opini WDP terhadap Daerah yang ada di Indonesia.

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah 1). Apakah sistem akuntansi keuangan daerah

berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan? 2) Apakah kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan ? 3) Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui pengaruh dari sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan 2) Mengetahui pengaruh kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan 3) Mengetahui pengaruh dari aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan suatu skema yang menyeluruh dan ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Sistem akuntansi keuangan daerah juga meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Prinsip akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah :

1. Tidak bertujuan untuk mengukur laba

Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-

sumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh.

2. Tidak adanya kepentingan pemilik

Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila aset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan dividen pada akhir tahun buku.

3. Adanya akuntansi anggaran

Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan atau membuktikan atau ketaatan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Sistem akuntansi keuangan daerah akan berguna, dalam pengambilan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam.

Kualitas Aparatur Pemerintah

Kualitas aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat adalah kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh aparatur sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas aparatur pemerintah diukur melalui

pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah yang dimiliki sebagai modal terbaik untuk mewujudkan pengembangan diri dalam menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga mencapai kinerja yang maksimal.

Aparatur pemerintah yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam memenuhi pengerjaan tugas yang ada dapat meningkatkan kemampuan usahanya melalui pengadaan, pembinaan karir, diklat, sistem, serta pengelolaan administrasi guna meningkatkan kemajuan dari tujuan organisasi tersebut.

Menurut Azhar (2007) bahwa kualitas aparatur pemerintah dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Kualitas paratur pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator yang dikembangkan oleh Azhar (2007), yaitu 1) Latar belakang pendidikan 2) Uraian peran dan fungsi 3) Peran dan tanggung jawab 4) Fungsi akuntansi 5) Sumber daya pendukung operasional 6) Pelatihan keahlian dalam tugas dan 7) Aparatur yang berkualitas.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat manajemen untuk mengurangi efek dari resiko yang diidentifikasi. Aktivitas pengendalian harus efektif dan efisien dalam pelaksanaan tujuan pengendalian unit kerja. Aktivitas pengendalian merupakan bagian

integral dari perencanaan, implementasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban karyawan terhadap sumberdaya pemerintah dan pencapaian hasil yang efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang diperbaharui Kepmendagri No.120/2536/SJ/2010 dalam Nurhayati Soleha (2014) bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator yang dikembangkan oleh Wilkinson et al (2008), yaitu 1) Standard Operating Procedure (SOP) 2) Pemisahan wewenang 3) Dokumen dan catatan yang memadai 4) Tindakan disiplin atas pelanggaran dan 5) Pembatasan akses

Salah satu komponen pengendalian internal menurut COSO adalah aktivitas pengendalian (*control activities*). Aktivitas pengendalian menunjukkan usaha perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang sedang dihadapi, seperti kecurangan (*fraud*). Ada 6 prinsip dari aktivitas pengendalian, antara lain:

1. *Establishment of responsibility* (pembentukan tanggung jawab) adalah sebuah prinsip penting dari pengendalian internal adalah dengan menetapkan tanggung

- jawab kepada karyawan tertentu.
2. *Segregation of duties* (pemisahan tugas) sangat penting dalam sistem pengendalian internal.
 3. *Documentation procedures* (prosedur dokumentasi), perusahaan harus membangun prosedur untuk mendokumentasi setiap transaksi. Perusahaan seharusnya menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga kejadian transaksi dicatat dua kali dapat terhindar.
 4. *Physical controls* (pengendalian secara fisik) berhubungan dengan penjagaan aset dan memastikan ketepatan dan reliabilitas catatan akuntansi.
 5. *Independent internal verification* (verifikasi internal yang independen) prinsip ini melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan.
 6. *Human resource controls* (pengendalian sumber daya manusia) beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pengendalian sumber daya manusia antara lain adalah memantau karyawan yang memegang kas, merotasi pekerjaan karyawan dan memberikan karyawan kesempatan untuk berlibur, melakukan pemeriksaan latar belakang.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (BPKP, 2009).

Akuntabilitas keuangan akan mampu meningkatkan kualitas pemerintahan dengan mengacu pada setiap aktivitas pada program yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan kemampuan tiap daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan keuangan yang memadai. Akuntabilitas keuangan juga akan mempengaruhi daya saing pemerintah dalam memberikan bentuk perencanaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas keuangan menjadi perwujudan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan perencanaan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan harus menjadi pedoman dalam menyajikan informasi secara lengkap, andal, dan relevan.

Akuntabilitas keuangan akan memberikan tingkat kepercayaan publik terhadap tanggung jawab pemerintah dalam pemakaian keuangan publik menggunakan rencana strategis, rencana kinerja, kesepakatan kerja, laporan akuntabilitas keuangan, penilaian dan kendali manajemen pemerintahan. Akuntabilitas keuangan akan

memberikan hasil atau kegagalan pelaksanaan apabila akuntabilitas mengacu pada peraturan yang berlaku dalam menjalankan program-program ataupun kegiatan mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan suatu skema yang menyeluruh dan ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi. Pengukuran ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Indra Kurnia (2013) dengan dimensi akurat, relevan, tepat waktu, dan kelengkapan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Soleha (2014) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi peranan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat melalui penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik dan menyusunnya dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Pencapaian akuntabilitas keuangan dapat terwujud apabila pemerintah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah untuk

mencapai efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, pengamanan aset negara dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Indra Kurnia, 2013).

Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan, hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha1 : Diduga sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

Pengaruh Kualitas Aparatur Peemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Aparatur pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah. Oleh sebab itu pengembangan sumber daya manusia (dalam hal ini aparatur pemerintah), dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar laporan keuangan yang disusun baik dan andal. Sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah haruslah berkompeten dan independen serta mampu bertanggungjawab atas laporan yang telah disusunnya.

Menurut Azhar (2007) bahwa kualitas aparatur pemerintah dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden,

pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban.

Penelitian dilakukan oleh Indra Kurnia (2013), menyatakan bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan dengan Boedi Prihandono (2009) yang menemukan bahwa tanpa SDM yang berkualitas, pemerintahan tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan menuju sebuah target tujuan. Hal ini dikarenakan akuntabilitas keuangan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang kompeten dalam bidangnya dan berkualitas untuk menjaga keefektifan profesionalitas dalam pekerjaan yang dijalankan.

Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh kualitas aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan, hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha2: Diduga kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

Pengaruh Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Aktivitas pengendalian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan tahapan-tahapan sebagai bentuk pengendalian sebagai fungsi untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Penelitian yang mendukung aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dilakukan oleh Nurhayati Soleha (2014), menemukan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah, artinya dengan

aktivitas pengendalian yang baik akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah. Nurhayati Soleha (2014) menemukan bahwa pengendalian internal merupakan aspek penting dari *corporate governance*. Hal ini pemerintah daerah menggunakan sistem pengendalian untuk menjamin tujuan organisasi tercapai. Pengendalian intern memainkan peran yang signifikan bagi organisasi terhadap terciptanya *good corporate governance*, hal tersebut menjadikan lingkungan pemerintah daerah untuk memenuhi praktek pengelolaan organisasi yang baik. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha3 : Diduga aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah di kota Pekanbaru.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti, sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria-kriteria dalam pengambilan

sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan, Bendahara dan Kepala Dinas yang memiliki pengalaman bekerja 3 tahun.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas, organisasi perangkat daerah yang dapat dijadikan sampel berjumlah 32 OPD atau 96 responden.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, dilakukan melalui survei kuesioner yang diambil dari penelitian Indra Kurnia (2013) dan Nurhayati Soleha (2014)

- b. Data Sekunder

Diperoleh untuk melengkapi data primer, contohnya rincian nama OPD.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Metode studi pustaka yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literature.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara individual.

Variabel Dependen

Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (BPKP, 2009).

Variabel Independen

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah (X1) Menurut Indra Kurnia (2013) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan disusun dengan suatu skema yang menyeluruh dan ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Kualitas aparatur pemerintah (X2). Azhar (2007) mendefinisikan Kualitas aparatur pemerintah sebagai kemampuan dari Kepala Dinas/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban.

Aktivitas pengendalian (X3). Nurhayati Soleha (2014) menemukan bahwa aktivitas pengendalian adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi data yang digunakan untuk setiap variabel.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
AK	90	21	30	24.933	1.87712
SAKD	90	13	20	16.700	1.50989
KAP	90	24	35	29.033	2.02485
AP	90	20	30	25.022	2.29791
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Data Olahan, 2017.

HASIL UJI KUALITAS DATA

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap suatu pertanyaan pada kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:71).

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

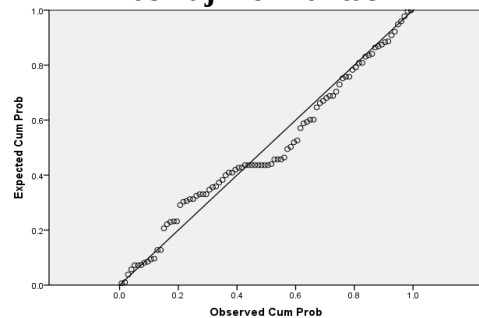
Var.	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Y	0,688	0,6	Reliabel
X1	0,705	0,6	Reliabel
X2	0,751	0,6	Reliabel
X3	0,787	0,6	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2017.

Hasil Uji Normalitas

Dengan menggunakan *Normal P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1
Hasil uji normalitas



Sumber : Data Olahan, 2017.

Dengan melihat tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikut arah garis diagonal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

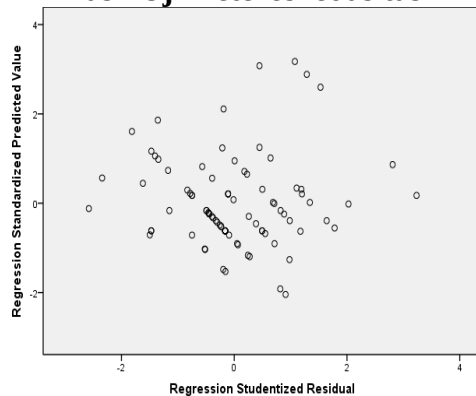
Hasil Uji Multikolinearitas

Apabila nilai $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$ berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variable leverage, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara berturut- turut adalah (1.249, 1.278, 1.103) < 10 dan tolerance (0.801, 0.782, 0.907) $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : *Data Olahan, 2017.*

Dari gambar Scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 : 125).

Koefisien Determinasi

Digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 ^a	.651	.629	1.53803

Sumber : *Data Olahan, 2017.*

Diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,629. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas aparatur

pemerintah dan aktivitas pengendalian) terhadap variabel dependen (akuntabilitas keuangan) adalah sebesar 62,9 %. Sedangkan sisanya 37,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Hasil analisis regresi hipotesis pertama dengan metode enter untuk model analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.373	2.721		2.709	.008
SAKD	.453	.121	.365	3.758	.000
KAP	.252	.091	.272	2.767	.007
AP	.207	.075	.131	2.435	.009

Sumber : *Data Olahan, 2017.*

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) adalah 1,987

- Nilai t_{hitung} sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 3,758 > t_{tabel} 1,987, artinya sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
- Nilai t_{hitung} kualitas aparatur pemerintah sebesar 2,767 > t_{tabel} 1,987, artinya kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
- Nilai t_{hitung} aktivitas pengendalian sebesar 2,435 > t_{tabel} 1,987, artinya

aktivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Secara matematis untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Persamaan Regresi Berganda:

$$Y = 7,373 + 0,453X_1 + 0,252X_2 + 0,207X_3 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (α) sebesar 7,373. Artinya adalah apabila variabel sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas aparatur pemerintah dan aktivitas pengendalian diasumsikan nol (0), maka akuntabilitas keuangan sebesar 7,373.
- Nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,453. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,453.
- Nilai koefisien regresi kualitas aparatur pemerintah sebesar 0,252. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kualitas aparatur pemerintah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,252.
- Nilai koefisien regresi aktivitas pengendalian sebesar 0,207. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan aktivitas pengendalian sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0,207.

Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil olah data SPSS pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda dijelaskan sebagai berikut :

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4 didapat nilai t_{hitung} senilai 3,758. Nilai t tabel sebesar 1,987, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 87 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 3,758 > t_{tabel} 1,987$. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sementara itu, dalam tabel 4 didapat P value 0,000 yang berarti P value $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Penjelasan diatas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan

Nurhayati Soleha (2014) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi peranan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan transparansi kepada masyarakat luas melalui penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah secara sangat baik dan menyusunnya dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum.

Kualitas Aparatur Pemerintah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,767. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,767 > t_{tabel} 1,987$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sementara itu, dalam tabel 4 didapat P value 0,007 yang berarti P value $0,007 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa kualitas aparatur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa kualitas aparatur pemerintah sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Aparatur pemerintah daerah yang kompeten dalam bidangnya, cukup berkualitas dan melakukan tugas dengan profesional,

baik dan transparan sehingga dapat menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Kurnia (2013) yang menemukan bahwa kualitas aparatur pemerintah akan dinilai melalui kapabilitas yang dimiliki oleh aparatur dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Seluruh transaksi keuangan pemerintah yang akan melalui proses pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan harus dilaporkan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Aktivitas Pengendalian Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,368. Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,435 > t_{tabel} 1,987$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Maka dapat disimpulkan **H₃ diterima** yaitu aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sementara itu, dalam tabel 4 didapat P value 0,009 yang berarti P value $0,009 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Penelitian yang mendukung aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dilakukan oleh Nurhayati Soleha (2014) yang menemukan bahwa

aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah, artinya dengan aktivitas pengendalian yang baik akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Nurhayati Soleha (2014) menambahkan secara konsisten bahwa pengendalian internal merupakan aspek penting dari *corporate governance*. Hal ini pemerintah daerah menggunakan sistem pengendalian untuk menjamin tujuan organisasi tercapai. Pengendalian intern memainkan peran yang signifikan bagi organisasi terhadap terciptanya *good corporate governance*, hal tersebut menjadikan lingkungan pemerintah daerah untuk memenuhi praktek pengelolaan organisasi yang baik. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan penelitian adalah:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini berarti bahwa aparatur pemerintah yang menerapkan system akuntansi keuangan daerah akan mempengaruhi akuntabilitas keuangan.
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini berarti staf aparatur pemerintah yang berkualitas akan

mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini berarti bahwa prosedur dan aturan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah akan mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang dapat digunakan nantinya sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca ataupun peneliti selanjutnya yang akan meneliti ini adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, yaitu tidak meneliti pada OPD yang sama, namun dapat menambahkan OPD lainnya yang berada di Provinsi Riau, sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan, seperti menambahkan variabel independen atau menggunakan variabel intervening ataupun variabel moderating untuk memperoleh hasil yang berbeda. Variabel penerapan pemahaman akuntansi dan kualitas sumber daya manusia dapat dijadikan rekomendasi untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
3. Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari

kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan data sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. T.Lingga Jaya. Jakarta.
- BPKP.2009. Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) BPKP Tahun Anggaran 2009.
- Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. UUP STIM. Halaman 254.
- Kurnia, Indra. 2013. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan”. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Nazier, Daeng.M. 2006. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten Dan Kota Melalui Harmonisasi PP No. 58 Tahun 2005.
- Prihandono, Boedi. 2009. *Transparansi Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan*. Jurnal Transparansi, Vol 4 No.1. Jakarta.
- Soleha, Nurhayati. 2014. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan”.
- Wilkinson et al. 2008. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Alam, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- Website resmi:
bpk.go.id/hasilpemeriksaanlkdktotapekanbarutahun2014/02/07/2014